

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENCATATANNYA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Oleh

MUJAHIDIN

105730497014



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL
ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENCATATANNYA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GOWA

OLEH
MUJAHIDIN
NIM 105730497014

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Bakri dan Ibu Hasiah yang telah memberikan Do'a ,nasehat semangat dukungan moril maupun materi. serta
2. Teruntuk Istriku yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
3. Bapak dan ibu Dosen, terkhusus kepada kedua pembimbingku yang selama ini telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, menuntun dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Para sahabat dan teman - teman seperjuanganku selama menempuh pendidikan terimakasih atas semngat dan bantuan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini .

MOTTO HIDUP

Mulailah dari tempat mu berada

Gunakan yang kau punya

Lakukanlah yang kau bisa

(Arthur Ashe)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Igra Lt.7 Tel. (0411) 860 837 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatanya
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.
Nama Mahasiswa : Mujahidin
No. Stambuk : 10573 04970 14
Program Studi : Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia
penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018.

Makassar, November 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Hj. Naidah, SE, M.Si
NIDN : 10026403

Pembimbing II,

Muttiarni, SE, M.Si
NIDN : 0930087503

Mengetahui,

Dekan,



Ismail Rasufong, SE, MM
NEMs 903078

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak.CA.CSP
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar


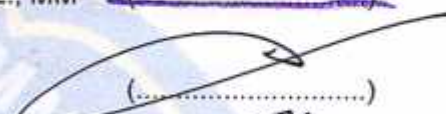







LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Mujahidin**, NIM : **105730497014**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0016/SK-Y/62201/091004/2018, Tahun 1438 H/2018 M, Tanggal 18 Safar 1440 H/ 27 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Safar 1440 H
27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM 
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM 
2. Ismail Rasulong, SE., MM 
3. Andi Arman, SE., M.Si.Ak.CA 
4. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si, Ak.CA 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujahidin
Stambuk : 105730497014
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya pada Badab Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa."

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, November 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Mujahidin

Diketahui Oleh:



Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasidong, SE., MM

NBM : 1003078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badellahi, SE., Msi., Ak.GA.GSP

NBM : 1073428

ABSTRAK

MUJAHIDIN, 2018 dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa”. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Naidah dan Pembimbing II Muttiarni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada pendapatan asli daerah dan pencatatannya pada Badan pendapatan kabupaten gowa. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan pengamatan lapangan (*Field Research*) terdiri dari observasi, interview dan Dokumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Yang ada menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tahun 2016-2017 mengalami peningkatan.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Pencatatan, Realisasi Anggaran*

ABSTRACT

MUJAHIDIN, 2018 with the title "Analysis of Regional Original Revenue and Recording of Regional Revenue Service in Gowa Regency". Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Naidah and Supervisor II Muttiarni.

This study aims to determine the Regional Original Revenue and Recording in the Regional Revenue Service of Gowa Regency. The type of research used in the study is descriptive qualitative. The focus of the research is directed to the region's original income and recording it in the gowa district revenue office. The data collection techniques carried out by the author, namely the research library (Library Research) and field observation (Field Research) consists of observation, interviews and documents

The results of the study indicate that the existing Regional Original Revenue shows that local revenue in 2016-2017 has increased.

Keywords: Regional Original Revenue, Recording, Budget Realization

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan Karunianya Skripsi yang Berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa”. Skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan namun berkat dorongan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr.H Abd Rahman Rahim,SE.MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.MM selaku Dekan beserta Seluruh Staff Fakultas Ekonomi Dan Bisnis .
3. Bapak Ismail Badollah,SE.,M.Si.AK.CA Selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hj.Naidah,SE,M.Si , selaku pembimbing I dan Ibu Muttiarni ,SE.M.Si selaku pembimbing II yang telah bannyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

5. Seluruh Pegawai Akademik dan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada pimpinan Dan Seluruh Staff Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Gowa.
7. Seluruh Keluarga Besar Penulis Terutama untuk kedua orang tua penulis terimakasih atas do'a, nasehat dan dukungannya sehingga penulis bisa seperti sekarang ini.
8. Teruntuk Istri terimakasih atas Doa, motivasi dan dukungannya.
9. Saudara-saudara seperjuangan di Akuntansi 8 2014 yang telah memberikan begitu banyak Kesan di keseharian penulis selama menempuh pendidikan .
10. Dan semua pihak yang menyayangi penulis yang telah memberikan nasehat,dorongan dan motivasi kepada penulis. Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Sebagai manusia biasa yang penuh kekurang, peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik isi maupun bahasanya walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan Penelitian ini.akhir kata saya ucapkan Billahi fisabililhaq Fastabiqul Khairat , wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar ,...2018

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pendapatan Asli Daerah	5
B. Pencatatan Realisasi Anggaran	11

C. Penelitian Terdahulu	15
D. Kerangka Konsep.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Fokus Penelitian.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	27
F. Instrumen Penelitian.....	27
G. Metode Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	29
1. Sejarah Singkat Berdirinya kantor Bupati Gowa.....	29
2. Visi Dan Misi	29
3. Tujuan Badan Pendapatan Kabupaten Gowa	30
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Karyawan	30
B. Hasil Penelitian	46
1. Pendapatan Asli Daerah.....	46
C. Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR LAMPIRA	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Realisasi pendapatan Asli daerah tahun 2016	46
Tabel 4.2	Realisasi rincian pajak daerah tahun 2016	47
Tabel 4.3	Realisasi rincian retribusi daerah tahun 2016	48
Tabel 4.4	Realisasi rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah	50
Tabel 4.5	Realisasi rincian lain-lain PAD yang sah tahun 2016	51
Tabel 4.6	Realisasi pendapatan Asli daerah tahun 2017	52
Tabel 4.7	Realisasi rincian pajak daerah tahun 2016	53
Tabel 4.8	Realisasi rincian retribusi daerah tahun 2016	54
Tabel 4.9	Realisasi rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah	56
Tabel 4.10	Realisasi rincian lain-lain PAD yang sah tahun 2016	57

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Bagan kerangka Pikir	24
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan pusat memberikan peluang bagi perubahan pemerintahan daerah yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah yang menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Pada daerah otonomi provinsi, kabupaten/kota di Indonesia memiliki sumber daya alam yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan pendapatan asli daerah yang juga akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Otonomi daerah daerah adalah sebagai perwujudan dalam desentralisasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan pemerintah kabupaten/ kota.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pada pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Serta dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri (PEMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 pasal 3 ayat 1 tentang pendapatan daerah dan dalam pasal 22 ayat 1 huruf (a), meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas

dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali kepada daerah.

Peraturan Undang-undang yang ada di Indonesia menjadi dasar dalam pemerintahan daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah dan pendapatan lainnya yang sah dengan mengolah kembali pendapatan daerah untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

Pada umumnya kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah dibutuhkan sebuah anggaran yang mampu menggerakkan fungsi pada pemerintah, dimana pemerintah daerah harus mampu mengolah pendapatan daerah yang didapatkan dari hasil sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Gowa pada Badan Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016, menjelaskan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pendapatan daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan pengeluaran daerah dan meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Gowa. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Pada Tahun 2016. Berdasarkan data yang didapatkan dan

realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gowa telah mencapai target meski jatuh tempo penyetoran masih tersisa kurang lebih dua bulan dengan target pendapatan asli daerah sebanyak Rp.1.1 miliar dan sampai saat ini telah dilakukan realisasi penerimaan pajak yang di sektor pariwisata sebesar Rp. 1,8 miliar lebih atau sekitar 160%. Penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup besar untuk pada tahun 2016 dari target yang ditentukan, dengan pencapaian ini pemerintah kabupaten gowa optimistis pada tahun 2017 akan lebih meningkatkan target pendapatan asli daerah sehingga mencapai Rp. 2 miliar. Menurut Rimba yang menjadi faktor utama dalam memenuhi tercapainya target pendapatan asli daerah karena pola kerja yang diterapkan langsung berhubungan dengan para pelaku usaha dengan meminta laporan penerimaan atau keuntungan setiap hari dari pemilik usaha.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Natalia rawung Tahun 2016 dengan judul " Analisis pendapatan asli daerah dan pencatatannya pada Dinas pendapatan kota manado". Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif adapun hasil penelitian menunjukkan penerimaan dari pajak dan retribusi pada Dinas Pendapatan Kota Manado Tahun 2013-2014 mengalami peningkatan .

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pendapatan asli daerah dan Pencatatannya yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten gowa dengan judul skripsi :**"Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya pada Tahun 2016-2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Tahun 2016 -2017.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh peneliti yaitu:

1. Bagi pemerintah: diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil pajak, hasil retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah.
2. Bagi penulis: dapat bermanfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pendapatan yang ada di daerah dan menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.
3. Bagi Dunia Pendidikan: diharapkan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Natalia Rawun (2016) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sehingga analisis pendapatan asli daerah menjadi salah satu factor yang penting dalam mencapai sumber-sumber keuangan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna untuk membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan setiap yang tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Menurut Muhtarom (2016) pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari daerah secara langsung. Semakin besar pendapatan asli daerah tersebut semakin besar pula pembangunan daerah yang dapat dilaksanakan sesuai dengan APBD daerah.

Menurut Halim (2002:93), mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah

seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Mardianso (2002:132), mengungkapkan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh Dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

Menurut Siahaan 2005, pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah yang menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 Undang-undang Nomor. 33 tahun 2004).

Menurut Nurcholiz (2007:182) pendapatan asli daerah adalah pendapata yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU Nomor. 32 tahun 2004) tentang pemerintah daerah, pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.

Adapun kesimpulan Pendapatan Asli Daerah menurut pendapat diatas yang disimpulkan penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan

yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber pendapatan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah yang ada di daerah dengan berdasarkan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Gowa.

Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yang terdiri atas:

1. Pajak daerah

Menurut Taluke 2013 Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah pada tanggal 21 November 2016 dan telah diundangkan pada tanggal 22 November 2016. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Peraturan pemerintahan tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang pungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Adapun materi yang diatur dalam peraturan pemerintahan tersebut meliputi:

- a. Jenis – jenis pajak daerah dan pengaturan penetapan pajak dalam peraturan daerah
- b. Pendaftaran wajib pajak dan masa pajak
- c. Penetapan, Pembayaran, Pelaporan, dan ketetapan pajak
- d. Penagihan dan penghapusan piutang pajak
- e. Keberatan dan banding
- f. Pembukuan dan pemeriksaan
- g. Penelitian surat setoran pajak daerah Bea perolehan atas tanah dan bangunan
- h. Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- i. Pajak yang dibayarkan dan dipungut pemerintah.

Menurut Rory 2016 dalam Rochmat Sumirno bahwa pajak daerah adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah

pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui undang-undang nomor 28 tahun 2009. Dengan undang-undang ini dicabut UU Nomor 18 tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000. Berlakunya undang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karna tidak boleh lagi dipungut oleh daerah terutama berasal dari retribusi daerah.

Menurut Muhtarom 2016 Retribusi daerah yaitu, pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang berlaku di pemerintah daerah. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung yang harus memenuhi persyaratan formil maupun materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang bersifat budgetatifnya tidak menonjol, dalam hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat (Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004).

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Muhtarom 2016 Hasil pengelolaan kekayaan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih dari pengelolaan kekayaan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian pengelolaan (undang-undang RI

Nomor 34 tahun 2004). Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti perusahaan daerah air minum (PDAM), Bank pembangunan daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif nurcholis, 2007:184). Menurut Ahmad yani (2004 :40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Pendapatan lain-lain yang sah

Menurut Muhtarom 2016 pendapatan lain-lain yang sah yaitu pendapatan yang tidak termasuk jenis pendapatan lainnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan yang dipisahkan. Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pada pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004).

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan

penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Rori 2016 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang jasa oleh daerah.

B. Pencatatan Realisasi Anggaran

Menurut Siregar (2017:117) Laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Realisasi anggaran adalah pelaksanaan APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menunjukkan ketaatan pemerintah terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Mulyadi (2003:121) mengungkapkan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen pencatatan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Halim (2007:112) menyatakan pencatatan realisasi anggaran merupakan transaksi yang terjadi yang merupakan dokumen sumber pencatatan akuntansi.

Menurut beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pencatatan realisasi anggaran sangat penting dalam pelaporan keuangan yang terjadi dalam pemerintah badan usaha lainnya. Sebagai bahan untuk menyajikan suatu informasi pelaporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

Menurut Siregar (2017:118) Laporan realisasi anggaran menyajikan berbagai unsur-unsur yaitu:

1. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran adalah merupakan teknik pertanggung jawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan .

2. Pendapatan laporan realisasi anggaran

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan daerah – LRA diakui pada saat uang diterima pada rekening kas umum negara/daerah, yang mana pencatatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat jumlah bruto penerimaan, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), namun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka dapat mencatat nilai nettonya.

Pemerintah mungkin saja melakukan kekeliruan dalam menghitung tagihan pendapatan yang mengakibatkan kelebihan penerimaan pendapatan, jika hal ini terjadi maka pemerintah harus mengembalikan pendapatan tersebut. Pengembalian yang sifatnya *sistemik* (normal) dan berulang (*recurring*) terjadi atas penerimaan pendapatan laporan LRA pada periode penerimaan (tahun anggaran berjalan) maupun pada periode sebelumnya (tahun anggaran sebelumnya) dibkukan sebagai pengurangan pendapatan LRA.

Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 tahun 2010 dan permendagri Nomor 64 tahun 2013. penerapan sistem

3. Belanja daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periodetahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

4. Surplus atau defisit LRA

Surplus atau defisit LRA adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibagi kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Menurut Kaeng (2015) pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

6. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi anggaran dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran selama satu periode pelaporan.

C. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang didapat oleh penulis dalam mendukung temuan penelitian. Penulis mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1berikut ini :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Natalia Rawung (2016)	Analisis pendapatan asli daerah dan pencatatannya pada dinas pendapatan kota manado	Deskriptif	Menunjukkan penerimaan dari pajak dan retribusi pada dinas pendapatan kota manado mengalami peningkatan di tahun 2014 dibandingkan ditahun 2013. Sebaiknya pimpinan dinas pendapatan kota manado lebih memperhatikan sumber-sumber penerimaan agar tidak terjadi penurunan penerimaan ditahun yang akan datang.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
2	Aprisilia Ristia, dkk (2015)	Analisis pendapatan asli daerah untuk belanja daerah pada pemerintah kota tomohon	Deskriptif kuantitatif	Menunjukkan kinerja pendapatan pemerintah Kota Tomohon dilihat dari analisis resio keuangan dalam hal ini, derajat desentralisasi fiscal dan kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. pemerintah Kota Tomohon belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah berupa dana transfer/ dana perimbangan dari pemerintah pusat.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
3	Abid Muhtarom (2016)	Analisis pendapatan asli daerah sektor perusahaan daerah di kabupaten lamongan	Deskriptif kualitatif	Menunjukkan bahwa hasil analisis perhitungan kontribusi bahwa laba BUMN pada tahun 2010 sampai tahun 2014 masih memiliki kontribusi meskipun tidak maksimal terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lamongan.
4	Chindy Febry Rori, dkk (2016)	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi utara tahun 2001- 2013	Ordinary least square (OLS) Metode regresi sederhana	Menunjukkan bahwa variabel bebas atau pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau pertumbuhan ekonomi.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
5	Elvi Syahria Maznawaty, dkk (2015)	Analisis penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Maluku utara	Deskriptif kuantitatif	Menunjukkan tingkat pertumbuhan PAD Maluku utara tahun 2013-2014 sebesar 22,53%. Penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD dari target realisasi tahun 2013-2014 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu sebesar 58,62%. Namun, pada tahun 2014 dari realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami penurunan kontribusi yaitu sebesar 44,05% kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 77,57%.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
6	Hasyunah (2014)	Analisis kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja pemerintah kabupaten musi banyuasi.	Data primer dan data sekunder	Ditunjukkan dalam tabel, terlihat bahwa selama kurun waktu 4 tahun (2004-2007) rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah secara total mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu dengan rata-rata 93,49% per tahun.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
7	Maxwel taluke (2013)	Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah dikabupaten Halmahera barat	Kualitatif , kuantitatif	Menunjukkan pendapatan asli daerah sangat bergantung pada penerimaan pajak dan retribusi pada tahun 2007-2011 kontribusi pajak rata-rata sebesar 17,58%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah rata-rata sebesar 34,24%. Penerimaan pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan ditahun 2008-2010.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
8	Cherrya Dhia Wenny (2012)	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara	Metode Deskriptif kuantitatif	Diketahui bahwa secara simultan, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain pendapatan yang sah secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa besarnya nilai adjusted R square sebesar 0,396 menunjukkan 39,6% variasi atau perubahan dalam kinerja dapat dijelaskan

				oleh variasi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah serta lain-pendapatan yang sah, sedangkan sisnya 60,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain.
9	Aprisilia Ristia kaeng dan David P.E saerang	Analisis pendapatan asli daerah untuk belanja daerah pada pemerintah kota tomohon	Metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan kinerja pendapatan pemerintah kota tomohon dilihat dari analisis rasio keuangan dalam hal ini, derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Pemerintah kota tomohon belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.

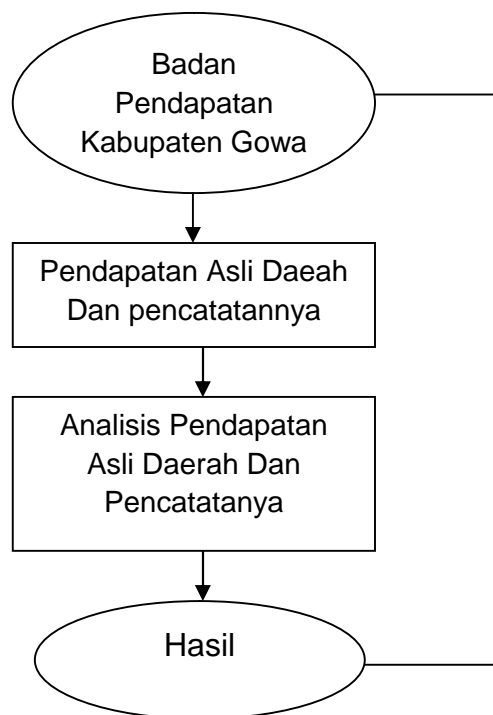
NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
10	Junarwati, dkk	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap kinerja keuangan Daerah Pada kabupaten/kota di provinsi Aceh 2010-2012	Metode analisis regresi liniear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 71,4%. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan kemampuan PAD membiayai belanja langsung non pegawai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik buruknya kinerja keuangan suatu daerah dapat ditentukan dari pendapatan dyang diterima daerah tersebut.

D. Kerangka Konseptual

Menurut Halim (2002:93), Mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah

seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Menurut Siregar (2017:117) Laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Realisasi anggaran adalah pelaksanaan APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menunjukkan ketaatan pemerintah terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan



Gambar 2.1
Alur pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis data penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif menurut Eko Sugiarto (8:2015) adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik – konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari penelitian sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

C. Tempat dan waktu penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Jl.Mesjid Raya No.30 Kabupaten Gowa. Dengan waktu penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu 2 bulan, dimulai pada bulan Agustus sampai bulan september 2018.

D. Jenis dan Sumber data

Analisis Data kualitatif bersifat deskriptif, berupa data yang bersifat angka-angka atau dalam bentuk grafik yang didapatkan pada Badan Pendapatan Daerah dan disajikan atau dikumpulkan dan mendeskripsikan data yang telah didapatkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Contohnya laporan Pencatatan realisasi anggaran yang didapatkan dari Badan Pendapatan kabupaten gowa. data ini dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung sebagaimana dalam tehnik pengumpulan data.

1. Sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh dengan survey lapangan langsung yang menggunakan metode pengumpulan data seperti mengamati langsung kegiatan karyawan yang bekerja di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan data yang sudah disiapkan oleh tempat penelitian atau dokumen perusahaan yang berupa catatan dan pelaporan pendapatan asli daerah dan realisasi anggaran, kemudian di uraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini yang ada di Kabupaten Gowa.

E. Tehnik pengumpulan data

1. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang diantaranya kepala dinas bagian keuangan dan staf pegawai bagian keuangan yang terlibat langsung serta berhubungan dengan data yang diperlukan peneliti yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.
2. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti berdasarkan pengetahuan dan fenomena yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dengan penulis pada di Badan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten gowa.
3. Dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan sebuah data yang tertulis dan bersifat informasi di kertas atau media elektronik yang dibutuhkan penulis pada Badan Pendapatan Daerah. Dokumen yang diperlukan berupa laporan pencatatan realisasi anggaran sebagai bahan untuk mengelola kembali dan mendeskripsikan hasil data yang didapatkan.

F. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument atau alat penelitian peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti meliputi : pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti , kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya. (Sugiono,2012:305).

Peneliti mungkin menggunakan alat- alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder. Vidio kaset atau kamera ,tetapik kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung kepada peneliti itu sendiri.

G. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif . penelitian deskriptif menurut Anwar sanusi (2014: 13) adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Adapun langkah- langkah yang dilakukan untuk menganalisis adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Bupati Gowa

Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang susunan organisasi kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Badan pendapatan daerah kabupaten gowa berada dalam ruang lingkup pemerintahan Kantor Bupati Gowa yang beralamatkan Jl.Mesjid Raya No 30 Kabupaten Gowa.

2. Visi Dan Misi

Visi

Terwujudnya badan pendapatan daerah yang handal dalam peningkatan pendapatan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatanasli daerah maupun dari pendapatan lainnya.
2. Megkoordinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.
3. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber sumber penerimaan daerah.

4. Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik.
 5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah.
3. Tujuan Badan Pendapatan Kabupaten Gowa
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
 - d. Pelaksanaan administrasi badan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Karyawan

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

1. Kepala Badan

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis, operasional dan strategik dalam penyelenggaraan kegiatan badan.
- b. Merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan.

- d. Membina satuan organisasi dalam lingkup badan.
- e. Mengarahkan satuan organisasi dalam lingkup badan.
- f. Menyelia permasalahan satuan organisasi dalam lingkup badan.

2. Sekretaris

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan
- b) Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- c) Pengordinasian urusan umum dan kepegawaian.
- d) Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan.
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas.
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan,asset, perencanaan dan pelaporan sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian.
- d) Menyelia pelaksanaan tugas sub.bagian perencanaan dan pelaporan sub.bagian keuangan,sub. bagian umumdan kepegawaian.

- e) Mengatur urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian.
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

A. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas pokok kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada kegiatan perencanaan pelaporan.
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian perencanaan dan pelaporan.
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan.
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan.
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan.
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan.

B. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaiaan

- a) Merencanakan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaiaan
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian umum dan kepegawaiaan.
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaiaan.
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaiaan
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaiaan
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaiaan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaiaan.

C. Sub Bagian Keuangan

- a) Merencanakan kegiatan pada sub bagian keuangan
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sub. Bagian keuangan.
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub. Bagian keuangan.
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian keuangan.
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian keuangan.

- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian keuangan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. Bagian keuangan.

3. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan

- a) Merencanakan operasional bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
 - b) Membagi tugas kepada masing-masing kepala sub. Bidang pada lingkungan bidang perencanaan dan pengembangan.
 - c) Memberi petunjuk kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang, baik lisan maupun tulisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku.
 - d) Menyelia permasalahan pada masing- masing sub. Bidang Perencanaan dan Pembangunan.
 - e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang perencanaan dan pengembangan.
- a. Sub bidang perencanaan pendapatan
- a) Merencanakan kegiatan pada sub.bidang perencanaan pendapatan.
 - b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sup.bidang perencanaan pendapatan.
 - c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub. Bidang perencanaan pendapatan;

- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub. Bidang perencanaan pendapatan;
 - e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub.bidang perencanaan pendapatan;
 - f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub. Bidang perencanaan pendapatan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. Bidang perencanaan pendapatan.
- b. Sub bidang pengembangan pendapatan daerah
- a) Merencanakan kegiatan pada sub. Bidang pengembangan pendapatan daerah;
 - b) Membagi tugas padamasing-masing bawahan pada lingkup sup. Bidang pengembangan pendapatan daerah;
 - c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub.bidang pengembangan pendapatan daerah;
 - d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatanpada sub.bidang pengembangan pendapatan daerah;
 - e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub.bidang pengembangan pendapatan daerah;
 - f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub.bidang pengembangan pendapatan daerah dan

memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. Bidang pengembangan pendapatan daerah.

C.. Sub bidang hukum dan perundang-undangan

- a) Merencanakan kegiatan pada sub. Bidang hukum dan perundang – undangan.
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sub bidang hukum dan perundang-undangan.
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub bidang hukum dan perundang – undangan.
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang hukum dan peundang – undangan.
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang hukum dan perundang-undangan.
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub.bidang hukum dan perundang-undangan. dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. bidang hukum dan perundang-undangan.

4. Bidang pelayanan pendapatan daerah

- a) Merencanakan operasional bidang pelayanan pendapatan daerah.
- b) Membagi tugas kepada masing-masing kepala sub bidang pada lingkup bidang pelayanan pendapatan daerah.
- c. Memberi pentunjuk kepada bawahan dalam lingkup bidang pelayanan pendapatan daerah baik lisan maupun tertulis agar

tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Menyelia permasalahan pada masing-masing sub bidang dalam lingkungan bidang pelayanan pendapatan daerah.
- e. Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada lingkup bidang pelayanan pendapatan daerah.

4.1 Sub Bidang pelayanan PBB-P2

- a) Merencanakan kegiatan pada sub.Bidang pelayanan PBB-P2;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sub.Bidang pelayanan PBB-P2;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub.Bidang pelayanan PBB-P2;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub.Bidang pelayanan PBB-P2;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang pelayananPBB-P2;
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub.bidang pelayanan PBB-P2 dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. sub.bidang pelayanan PBB-P2.

4.2 Sub Bidang Pelayanan BPHTB

Tugas pokok kepala sub. Bidangpelayanan BPHTB dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada sub.bidang pelayanan BPHTB
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sub. Bidang pelayanan BPHTB
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub bidang pelayanan BPHTB
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pelayanan BPHTB
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pelayanan BPHTB
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub.bidang pelayanan BPHTB dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. sub.bidang pelayanan BPHTB.

4.3 Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya

Tugas pokok kepala sub.bidang pelayanan pendapatan lainnya dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada sub bidang pelayanan pendapatan lainnya
- b) Membagi tugas kepada masing-masing staff pada lingkup sub bidang pelayanan pendapatan lainnya
- c) Menyeliapelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub bidang pelayanan pendapatan lainnya

- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pendapatan lainnya
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pelayanan pendapatan lainnya
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub.bidang pelayanan pendapatan lainnya. dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. sub.bidang hpelayan pendapatan lainnya..

5. Bidang penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Tugas pokok dan fungsi kepala bidang penetapan, penagihan dan pembukuan dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan operasional bidang penetapan, penagihan dan pembukuan
- b) Membagi tugas kepada masing-masing kepala sub bidang pada lingkup bidang penetapan, penagihan dan pembukuan
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup bidang penetapan, penagihan dan pembukuan, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d) Menyelia permasalahan bawahan dalam lingkup bidang penetapan, penagihan dan pembukuan

- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang penetapan, penagihan dan pembukuan

5.1 Sub Bidang Penetapan

Tugas pokok kepala sub bidang penetapan dirinci sebagai berikut

- a) Merencanakan kegiatan pada sub bidang penetapan
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan lingkup sub bidang penetapan
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub bidang penetapan
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penetapan
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penetapan
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub. bidang penetapan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. sub.bidang penetapan.

5.2 Sub Bidang Penagihan

Tugas pokok kepala sub bidang penagihan di rinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada sub bidang penagihan
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan lingkup sub bidang penagihan

- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub bidang penagihan
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penagihan
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penagihan
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub. bidang penagihan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. sub.bidang penagihan .

5.3 Sub Bidang Pembukuan

Tugas pokok kepala sub bidang pembukuan di rinci sebagai berikut

- a) Merencanakan kegiatan pada sub bidang pembukuan
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan lingkup sub bidang pembukuan
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub bidang pembukuan
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pembukuan
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pembukuan

- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub. bidang pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. sub.bidang pembukuan.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Tugas pokok kepala bidang pengawasan dan pengendalian di rinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan operasional bidang Pengawasan dan Pengendalian
- b) Membagi tugas kepada masing-masing kepala sub bidang pada lingkup bidang pengawasan dan pengendalian
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup bidang pengawasan dan pengendalian, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d) Menyelia permasalahan bawahan dalam lingkup bidang pengawasan dan pengendalian
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang pengawasan dan pengendalian

6.1 Bidang Penertiban Dan Keberatan

Tugas pokok kepala bidang penertiban dan keberatan di rinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada sub bidang penertiban dan keberatan

- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan lingkup sub bidang penertiban dan keberatan
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub bidang penertiban dan keberatan
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penertiban dan keberatan
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penertiban dan keberatan
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub. bidang penertiban dan keberatan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. sub.bidang penertiban dan keberatan.

6.2 Bidang Pengawasan Dan pengendalian

Tugas pokok kepala bidang pengawasan dan pengendalian di rinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada sub bidang pengawasan dan pengendalian
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan lingkup sub bidang pengawasan dan pengendalian
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub bidang pengawasan dan pengendalian
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pengawasan dan pengendalian

- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pengawasan dan pengendalian
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub.bidang pengawasan dan pengendalian dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. sub.bidang pengawasan dan pengendalian

6.3 Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga

Tugas pokok kepala bidang pengelolaan benda perharga di rinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada sub bidang pengelolaan benda berharga
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan lingkup sub bidang pengelolaan benda berharga
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub bidang pengelolaan benda berharga
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam kegiatan pada sub bidang pengelolaan benda berharga
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pengelolaan benda berharga.
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian sub.bidang pengelolaan benda berharga dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian sub. sub.bidang pengelolaan benda berharga

B. HASIL PENELITIAN

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yang terdiri atas sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut ini Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel.4.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/KURANG
1	Pendapatan pajak daerah	Rp. 69.648.135.430	Rp.78.471.938.351,84	Rp.8.823.802.921,84
2	Hasil retribusi daerah	Rp. 69.144.045.692	Rp.68.328.084.527	Rp. (815.961.165)
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 4.825.000.000	Rp. 4.386.251.872	Rp. (438.748.128)
4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 25.248.712.855	Rp.35.989.761.549,56	Rp.10.741.048.694,56
	jumlah	Rp168.865.893.977	Rp187.176.036.300,40	Rp18.310.142.323,40

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 sebesar Rp.168.865.893.977,- dan terealisasi sebesar Rp. 187.176.036.300,40 atau selisih lebih sebesar Rp.

18.310.142.323,40 yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat sebagai berikut:

Pendapatan pajak daerah dengan jumlah anggaran pada tahun 2016 pendapatan pajak daerah Rp.69.648.135.430,- dan terealisasi Rp. 78.471.938.351,84 atau selisih lebih besar Rp. 8.823.802.921,84 yang terdiri dari 10 bagian pendapatan pajak daerah antara lain:

Berikut ini rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi rincian pendapatan pajak daerah tahun 2016

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persen %
		2016	2016	Lebih/kurang	
2016	Pajak hotel	Rp. 120.000.000	Rp. 163.399.234	Rp. 43.399.234	36.1%
	Pajak restoran	Rp. 1.600.000.000	Rp. 1.650.629.260	Rp. 50.629.260	3.16%
	Pajak hiburan	Rp. 80.000.000	Rp. 325.203.281	Rp. 245.203.281	306%
	Pajak reklame	Rp. 357.500.000	Rp. 424.885.874	Rp. 67.385.874	18.8%
	Pajak penerangan jalan	Rp.19.000.000.000	Rp.22.953.482.883	Rp. 3.953.482.883	20.8%
	Pajak parkir	Rp. 15.000.000	Rp. 118.370.700	Rp. 103.370.700	689.1%
	Pajak air tanah	Rp. 300.000.000	Rp. 221.554.809	Rp. (78.445.191)	(26.1%)
	Pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp. 1.935.000.000	Rp. 524.667.500	Rp. (1.410.332.500)	(72.9%)

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Selisih (Rp) Lebih/kurang	Persen %
2016	Pajak bumi dan bangunan	Rp.11.240.635.430	Rp.13.184.036.086,84	Rp.1.943.400.656,84	17.2%
	Bea perolehan hak atastanah dan bangunan	Rp.35.000.000.000	Rp.38.905.708.724	Rp.3.905.708.724	11.15%
	Jumlah	Rp.69.648.135.430	Rp.78.471.938.351,84	Rp.8.823.802.921,84	12.67%

Pendapatan retribusi daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 69.144.045.692 dan terealisasi sebesar Rp. 68.328.084.527 atau selisih kurang sebesar Rp. (815.961.165) yang terdiri dari beberapa bagian:

Berikut ini rincian Realisasi Pendapatan retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Realisasi rincian retribusi daerah tahun 2016

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Selisih (Rp) Lebih/kurang	Persen %
2016	Retribusi pelayanan kesehatan	Rp.63.075.635.881	Rp.61.745.611.425	Rp.(1.330.024.456)	2.10%
	Retribusi pelayanan persampahan	Rp. 400.000.000	Rp. 303.235.000	Rp. 96.765.000	24.19%
	Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan	Rp. 19.200.000	Rp. 19.245.000	Rp. 45.000	0.23%
	Retribusi pelayanan parkir	Rp. 90.000.000	Rp. 101.000.000	Rp. 11.000.000	12.22%

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	Persen
		2016	2016	Lebih/kurang	%
2016	Retribusi pelayanan pasar	Rp. 925.889.811	Rp. 690.673.000	Rp. (235.216.811)	25.40%
	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Rp. 227.000.000	Rp. 261.104.500	Rp. 34.104.500	15.02%
	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Rp. 25.000.000	Rp. 28.980.000	Rp. 3.980.000	15.92%
	Retribusi penggantian biaya cetak peta	Rp. 1.000.000	0	Rp. 1.000.000	100%
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Rp. 366.100.000	Rp. 397.490.000	Rp. 31.390.000	8.57%
	Retribusi terminal	Rp. 507.220.000	Rp. 509.560.000	Rp. 2.340.000	0.46%
	Retribusi tempat penginapan	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	0	0%
	Retribusi rumah potong hewan	Rp. 83.000.000	Rp. 90.607.000	Rp. 7.607.000	9.16%
	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	Rp. 80.000.000	Rp. 88.100.000	Rp. 8.100.000	10.12%
	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	Rp. 425.000.000	Rp. 438.180.500	Rp. 13.180.500	3.10%
	Retribusi izin mendirikan bangunan	Rp. 2.545.000.000	Rp. 3.137.548.102	Rp. 592.548.102	23.28%

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persen
		2016	2016	Lebih/kurang	%
	Retribusi izin gangguan	Rp. 325.000.000	Rp. 467.150.000	Rp. 142.150.000	43.73%
	Retribusi izin trayek	Rp. 14.000.000	Rp. 14.600.000	Rp. 600.000	4.28%
	Jumlah	Rp. 69.144.045.692	Rp. 68.328.084.527	(Rp. 815.961.165)	1.18%

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan jumlah anggaran pada tahun 2016 Rp. 4.825.000.000 dan terealisasi Rp.4.386.251.872 atau selisih kurang besar Rp. (438.748.128) yang terdiri dari beberapa bagian antara lain:

Berikut ini rincian Realisasi Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Realisasi rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah tahun 2016

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persen
		2016	2016	Lebih/kurang	%
2016	Bagian laba atas penyertaan modal(BUMD)	Rp. 625.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. (475.000.000)	76%
	Bagian laba atas penyertaan(BUMN)	Rp. 3.900.000.000	Rp. 3.939.251.872	Rp. 39.251.872	1.00%
	Bagian laba atas penyertaan swasta	Rp. 300.000.000	Rp. 297.000.000	Rp. (3.000.000)	1%
	Jumlah	Rp. 4.825.000.000	Rp. 4.386.251.872	Rp. (438.748.128)	9.09%

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan jumlah anggaran pada tahun 2016 Rp 25.248.712.855 dan terealisasi Rp.35.989.761.549,56 atau selisih lebih besar Rp.10.741.048.694,56 yang terdiri dari beberapa bagian antara lain:

Berikut ini rincian Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Realisasi rincian lain-lain PAD yang sah tahun 2016

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Selisih (Rp) Lebih/kurang	Persen %
2016	Penerimaan jasa giro	Rp. 6.275.340.000	Rp.7.992.325.712,22	Rp.1.716.985.712,22	27.36%
	Pendapatan bunga	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Rp. 1.000.000	100%
	Tuntutan gaji kerugian daerah	Rp. 500.000.000	Rp.1.760.731.021,64	Rp.1.260.731.021,64	252.1%
	Pendapatan denda pajak	Rp. 0	Rp. 617.184.696	Rp. 617.184.696	0%
	Lain-lain PAD yang sah lainnya	Rp. 1.171.000.000	Rp.4.010.602.919,70	Rp.2.839.602.919,70	242.50%
	Pendapatan dana kapitasi JKN	Rp. 17.301.372.855	Rp.21.608.917.200	Rp.4.307.544.345	24.90%
Jumlah	Rp 25.248.712.855	Rp 35.989.761.549,56	Rp10.741.048.694,56	42.54%	

Sedangkan pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel.4.6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/KURANG
1	Pendapatan pajak daerah	Rp. 74.053.135.430	Rp. 89.747.690.642	Rp.15.694.555.212
2	Hasil retribusi daerah	Rp. 58.068.564.811	Rp. 55.937.919.224	Rp (2.130.645.587)
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 5.070.000.000	Rp. 4.625.881.692,94	Rp. (444.118.307,06)
4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.113.705.434.384	Rp.118.027.711.740,21	Rp.10.741.048.694,56
	Jumlah	Rp.250.897.134.625	Rp.268.339.203.299,15	Rp.17.442.068.674,15

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.250.897.134.625,00 dan terealisasi sebesar Rp.268.339.203.299,15 atau selisih lebih Rp.17.442.068.674,15 Adapun penjelasan di uraikan sebagai berikut:

Pendapatan pajak daerah dengan jumlah anggaran pada tahun 2017 Rp.74.053.135.430 dan terealisasi Rp.89.747.690.642 atau atau selisih lebih besar Rp.15.694.555.212 yang terdiri dari 10 bagian pendapatan pajak daerah antara lain:

Berikut ini rincian Realisasi Pendapatan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Realisasi rincian pendapatan pajak daerah tahun 2017

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Selisih (Rp) Lebih/kurang	Persen %
2017	Pajak hotel	Rp. 74.053.135.430	Rp. 89.747.690.642	Rp. 15.694.555.212	21.19%
	Pajak restoran	Rp. 2.300.000.000	Rp. 1.884.441.952	Rp. 415.558.048	18.06%
	Pajak hiburan	Rp. 80.000.000	Rp. 359.197.713	Rp. 279.197.713	349%
	Pajak reklame	Rp. 377.500.000	Rp. 646.740.063	Rp. 269.240.063	71.32%
	Pajak penerangan jalan	Rp. 22.000.000.000	Rp. 31.384.023.849	Rp. 9.384.023.849	42.65%
	Pajak parkir	Rp. 135.000.000	Rp. 175.644.600	Rp. 40.644.600	30.10%
	Pajak air tanah	Rp. 400.000.000	Rp. 244.931.247	Rp. (155.068.753)	38.77%
	Pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp. 400.000.000	Rp. 476.080.960	Rp. 76.080.960	19.02%
	Pajak bumi dan bangunan	Rp. 12.240.635.430	Rp. 14.019.130.698	Rp. 1.778.495.268	14.52%
	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Rp. 36.000.000.000	Rp. 40.128.117.782	Rp. 4.128.117.782	11.46%
Jumlah	Rp. 74.053.135.430	Rp. 89.747.690.642	Rp.15.694.555.212	21.19%	

Pendapatan retribusi daerah dengan jumlah anggaran pada tahun 2017 Rp. Rp.58.068.564.811 dan terealisasi Rp.55.937.919.224 atau atau selisih kurang sebesar Rp (2.130.645.587) yang terdiri dari beberapa bagian retribusi daerah antara lain:

Berikut ini rincian Realisasi Pendapatan retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Realisasi rincian retribusi daerah tahun 2017

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Selisih (Rp) Lebih/kurang	Persen %
2017	Retribusi pelayanan kesehatan	Rp. 51.240.155.000	Rp. 49.910.763.719	Rp. 1.329.391.281	2.60%
	Retribusi pelayanan persampahan	Rp. 400.000.000	Rp. 354.507.000	Rp. (45.493.000)	11.37%
	Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan	Rp. 19.200.000	Rp. 18.487.500	Rp. (712.500)	3.71%
	Retribusi pelayanan parkir	Rp. 90.000.000	Rp. 107.700.000	Rp. 17.700.000	19.66%
	Retribusi pelayanan pasar	Rp. 925.889.811	Rp. 674.188.000	Rp. (251.701.811)	27.07%
	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Rp. 227.000.000	Rp. 282.438.500	Rp. 55.438.500	24.42%
	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Rp. 40.000.000	Rp. 73.085.000	Rp. 33.085.000	82.71%
	Retribusi penggantian biaya cetak peta	Rp. 1.000.000	Rp. 0	Rp. 1.000.000	100%
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Rp. 371.100.000	Rp. 509.788.500	Rp. 138.688.500	37.37%

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persen
		2017	2017	Lebih/kurang	%
2017	Retribusi terminal	Rp. 507.220.000	Rp 429.180.000	Rp 78.040.000	15.39%
	Retribusi tempat penginapan	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 0	0%
	Retribusi rumah potong hewan	Rp 88.000.000	Rp 97.947.000	Rp 9.947.000	11.30%
	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	Rp 80.000.000	Rp 131.664.000	Rp 51.664.000	64.58%
	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	Rp 80.000.000	Rp 89.480.400	Rp 9.480.400	11.85%
	Retribusi izin mendirikan bangunan	Rp 3.500.000.000	Rp 2.407.729.605	Rp (1.092.270.395)	31.20%
	Retribusi izin gangguan	Rp 450.000.000	Rp 808.000.000	Rp 358.000.000	79.56%
	Retribusi izin trayek	Rp 14.000.000	Rp 7.960.000	Rp (6.040.000)	43.14%
	Jumlah	Rp. 58.068.564.811	Rp. 55.937.919.224	Rp (2.130.645.587)	3.67%

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa Badan Pendapatan Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan jumlah anggaran pada tahun 2017 Rp.5.070.000.000 dan terealisasi Rp 4.625.881.692,94 atau selisih kurang besar Rp. (444.118.307,06) yang terdiri dari beberapa bagian antara lain:

Berikut ini rincian Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Realisasi rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah tahun 2017

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Selisih (Rp) Lebih/kurang	Persen %
2017	Bagian laba atas penyertaan modal(BUMD)	Rp 625.000.000	Rp 315.000.000	Rp(310.000.000)	49.6%
	Bagian laba atas penyertaan(BUMN)	Rp 3.900.000.000	Rp 4.145.881.692,94	Rp245.881.692,94	6.30%
	Bagian laba atas penyertaan swasta	Rp 545.000.000	Rp 165.000.000	Rp(380.000.000)	69.72%
	Jumlah	Rp 5.070.000.000	Rp.4.625.881.692,94	Rp(444.118.307,06	8.76%

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gowa Badan Pendapatan Daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan jumlah anggaran pada tahun 2017 Rp.113.705.434.384 dan terealisasi Rp.118.027.711.740,21 atau selisih lebih besar Rp.10.741.048.694,56 yang terdiri dari beberapa bagian antara lain:

Berikut ini rincian Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Realisasi rincian lain-lain PAD yang sah tahun 2017

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Selisih (Rp) Lebih/kurang	Persen %
2017	Penerimaan jasa giro	Rp 6.275.340.000	Rp 8.000.614.828,10	Rp 1.725.278.828,10	27.50%
	Pendapatan bunga	Rp 1.000.000	Rp 0	Rp 1.000.000	100%
	Tuntutan gaji kerugian daerah	Rp 500.000.000	Rp 2.260.215384,11	Rp 1.760.215.384,11	352%
	Pendapatan denda pajak	Rp 0	Rp 821.434.670	Rp 821.434.670	0%
	Lain-lain PAD yang sah lainnya	Rp 1.171.000.000	Rp 1.671.869.473	Rp 500.869.473	42.77%
	Pendapatan dana kapitasi JKN	Rp 21.271.643.500	Rp 21.608.917.200	.Rp 108.753.200	0.51%
	Dana bos	Rp 84.486.450.884	Rp 84.103.543.206	Rp (382.907.678)	0.45%
	Jumlah	Rp.113.705.434.384	Rp118.027.711.740,21	Rp 10.741.048.694,56	9.44%

Berikut ini contoh jurnal yang terkait dengan pelaporan keuangan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Jurnal penyesuaian

Piutang pajak penerangan jalan	2.110.200.742,00
Koreksi ekuitas atas piutang	2.110.200.742,00
Piutang BPHTB	5.389.597.552,00
Koreksi ekuitas atas piutang	5.389.597.552,00
Piutang PBB pedesaan dan perkotaan	22.633.191.603,00

Koreksi ekuitas atas piutang	22.633.191.603,00
Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan	448.300.625,00
Koreksi ekuitas atas piutang	448.300.625,00
Koreksi ekuitas atas penyisihan piutang	10.853.685.888,70
Penyisihan piutang pajak daerah	10.853.685.888,70
Persediaan alat tulis kantor	74.683.250,00
Koreksi ekuitas atas persediaan	74.683.250,00

C.PEMBAHASAN

Badan pendapatan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan tetapa mengacu pada aspek efektifitas dan keadilan kepada masyarakat dalam arti bahwa pengelolaan keuangan dilakukan tepat waktu dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada begitu pula pada peningkatan pendapatan daerah dilakukan tanpa membebani ekonomi tinggi masyarakat.

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten gowa yang menjadi sumber utama pendapatan daerah adalah pajak penerangan jalan, pajak BPHTB dan pajak bumi dan bangunan, ini lah yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah kabupaten gowa.

Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah.pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yang terdiri atas:

1. Pajak daerah

Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan

umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui undang-undang nomor 28 tahun 2009. Dengan undang-undang ini dicabut UU Nomor 18 tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000. Berlakunya undang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karna tidak boleh lagi dipungut oleh daerah terutama berasal dari retribusi daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih dari pengelolaan kekayaan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian pengelolaan (undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004). Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas modal pada

perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti perusahaan daerah air minum (PDAM), Bank pembangunan daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan .

4. Pendapatan lain-lain yang sah

Pendapatan lain-lain yang sah yaitu pendapatan yang tidak termasuk jenis pendapatan lainnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan yang dipisahkan. Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pada pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004).

5. Pencatatan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah pelaksanaan APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menunjukkan ketaatan pemerintah terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

6. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah PP Nomor 71 tahun 2010 dan permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh ditahun 2015. serta peraturan menteri

dalam negeri no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.dan peraturan bupati gowa nomor 03 tahun 2015 tentang sistem akuntansi pemerintah kabupaten gowa

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif . penelitian deskriptif menurut Anwar sanusi (2014: 13) adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Adapun langkah- langkah yang dilakukan untuk menganalisis adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa 2016-2017 mengalami peningkatan atau kenaikan hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Natalia rawung Tahun 2016 dengan judul” Analisis pendapatan asli daerah dan pencatatannya pada Dinas Pendapatan Kota Manado”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif adapun hasil penelitian menunjukkan penerimaan dari pajak dan retribusi pada Dinas Pendapatan Kota Manado tahun 2013-2014 mengalami peningkatan .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

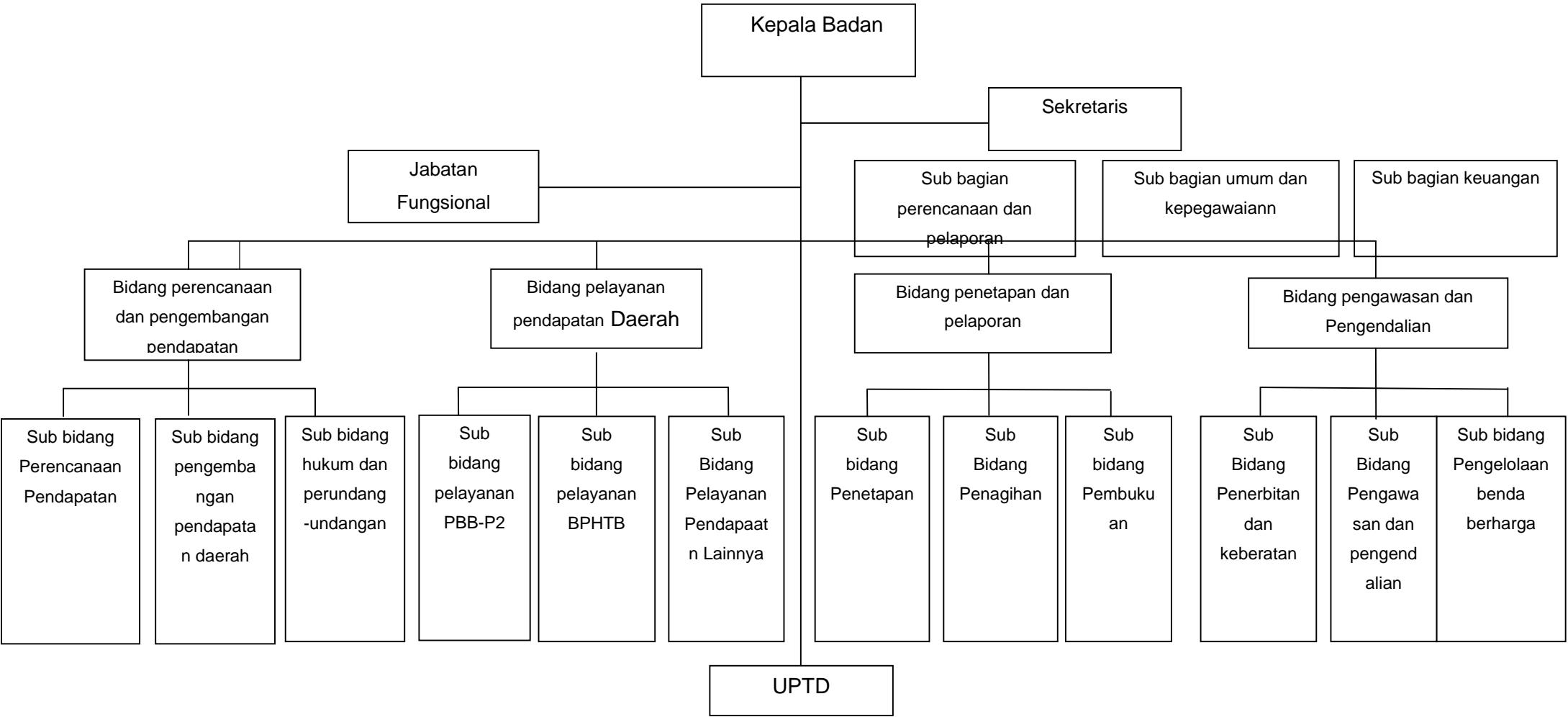
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Pendapatan asli daerah pada tahun 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.168.865.893.977,00 dan terealisasi sebesar Rp. 187.176.036.300,40 atau selisih lebih sebesar Rp. 18.310.142.323,40, sedangkan pada tahun 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.250.897.134.625,00 dan terealisasi sebesar Rp.268.339.203.299,15 atau selisih lebih Rp.17.442.068.674,15. Hal ini berkaitan dengan rumusan masalah dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2017 dan pencatatannya pada Badan Pendapatan Kabupaten Gowa terjadi kenaikan pada anggaran dan realisasi pendapatan pada tahun 2017.
2. Sumber-sumber pendapatan pada Badan Pendapatan Kabupaten Gowa selama periode tahun 2016-2017 memperlihatkan peningkatan yang sangat jauh pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 hal ini diakibatkan oleh situasi perekonomian nasional yang tidak stabil sehingga berpengaruh besar sampai kedaerah-daerah. Namun dari sumber-sumber penerimaan tersebut, ternyata pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masih mendominasi di Kabupaten Gowa.

B. Saran

1. Sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah harus lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang sangat jauh setiap tahunnya .
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun penatausahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisiketiga. Salemba Empat: Jakarta
- Hasyunah. 2014. Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal*. Vol. 3.
- Junarwati, et al. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*. Vol 6
- Kaeng, A.R., dan Saerang David.P.E. 2015. Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Emba*. Vol.3
- Lalombombuida, Socrates et al., 2014. Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talud. *Jurnal Emba*. Vol2
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Maznawaty.E.S et al. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Emba*. Vol.3
- Muhtarom, Abid. 2016. Analisis Pendapatan Asli Daerah Sektor Perusahaan Daerah di Kabupaten Lamongan. *Jurnal JESP*. Vol.8
- Mulyadi. 2003. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otomi Daerah. Grasindo: Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang- undang Republik Nomor. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia .2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Rawung, Natalia. 2016. Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal*. Vo.4

- Rori.C.F et al.2016.AnalisisPengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal.Vol16*
- Sanusi ,A. 2014 . *Metodologi Penelitian Bisnis*.Salemba Empat.Jakarta
- Siahaan,Marihot P.2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT.Jaya Grafindo Persada: Jakarta
- Siregar, Baldric. 2017.*Akuntansi Sektor Publik:Akuntansi Keuangan pemerintahdaerah berbasis akrual*.UPP STIM YPKN: Yogyakarta
- Sugiarto,E.2015.Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis.Suaka Media. Yogyakarta
- Sugiono.2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfa Beta
- Taluke,Maxwel. 2013.AnalisisKontribusi Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halimahera Barat.*Jurnal Emba. Vol.1*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor.28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Wenny,C.D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.*Jurnal. Vol.2*
<https://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/laporan-realisasi-anggaran>, diakses pada 1 februari 2018
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=4046>,diakses pada 1 februari 2018.
- <http://news.rakyatku.com/read/27844/2016/11/14/pad-disbudpar-gowa-sudah-lampau-terget>.diakses pada 9 februari 2018

L

A

M

P

I

R

A

N

Daftar wawancara pada dinas pendapatan daerah kabupaten gowa

1. Apa yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah?
2. Bisakah bapak menyebutkan apa saja yang termasuk kedalam pendapatan asli daerah?
3. Apa yang menjadi faktor utama dalam memenuhi tercapainya target pendapatan asli daerah?
4. Bagaimana pertumbuhan dan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten dari tahun ke tahun?
5. Bagaimana rata-rata penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada periode-periode sebelumnya?
6. Sepertiapa strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah?
7. Bagaimana prediksi terhadap kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusidaerah?
8. Bisakah bapak menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan pemerintah kabupaten gowa yang tercermin di dalam APBDnya?
9. Bagaimanakah cara penentuan dan penetapan target pajak restoran kabupaten gowa?
10. Adakah kesulitan atau kendala selain dana yang dihadapi dalam pemungutan pajak/realisasi target pajak? Dapatkah dijelaskan?
11. Apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran?
12. Adakah penyuluhan kepada wajib pajak di kabupaten gowa?

13. Adakah upaya yang memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak dikecamatan gowa?
14. Adakah kesulitan yang dihadapi dalam pembukuan dan pencatatan penerimaan pajak? Dapat dijelaskan?
15. Adakah penegasan sanksi pajak? Adakah kesulitan yang dihadapi dalam penegakan sanksi pajak?

**HASIL WAWANCARA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DI
KABUPATEN GOWA**

PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah ?

Dijawab oleh :DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Berdasarkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten gowa,maka sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah pajak BPHTB,pajak penerangan jalan, dan pajak bumi bangunan.

2. Bisakah bapak menyebutkan apa saja yang termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

- a. Pendapatan pajak daerah yang didalamnya terbagi menjadi beberapa unsur pendapatan pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- e. Dana perimbangan
- f. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- g. Belanja
- h. Transfer

3. Apa yang menjadi faktor utama dalam memenuhi tercapainya target pendapatan asli daerah?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Secara internal SKPD pengelolaan Pendapatan Asli Daerah intersifikasi

dalam penerimaan pajak. Secara eksternal masyarakat atau wajib pajak senantiasa diingatkan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Secara umum pemerintah daerah mengeluarkan regulasi atau peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi.

4. Bagaimana pertumbuhan dan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten gowa dari tahun ke tahun?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Secara umum perolehan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

5. Bagaimana rata-rata penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada periode-periode sebelumnya?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Rata-rata penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada periode sebelumnya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

6. Seperti apa strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

a. Intensifikasi pajak yaitu kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

b. Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

7. Bagaimana prediksi terhadap kemungkinan yang akan terjadi dimasa

yang akan datang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Kabupaten gowa merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan makassar, oleh karna itu maka kabupaten gowa adalah penyangga utamanya makassar bagian selatan menyikapi kondisi makassar sebagai ibu kota provinsi yang saat ini tidak tersedia lagi lahan untuk perumahan, oleh karna itu banyak orang makassar yang kurban atau pindah ke gowa untuk mencarilahan tempat tinggal.

- a. Konsekuensinya adalah digowa terjadi pengalihan ali fungsi lahan yang dulunya sawah dirubah menjadi sebuah tempat perumahan.
- b. Dengan berdirinya perumahan yang ada di gowa maka peningkatan pendapatan asli daerah oleh pemerintah daerah kabupaten gowa melalui berbagai sektor pajak seperti pajak PBB meningkat, pajak BPHTB meningkat, dan pajak-pajak lainnya ikut meningkat dengan adanya peningkatan jumlah penduduk sebagai urbanisasi dari makassar ke kabupaten gowa.

8. Bisakah bapak menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan pemerintah kabupaten gowa yang tercermin didalam APBDnya?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Kontribusi pendapatan adalah 1.7 triliun dan pendapatan asli daerah sebesar 189 miliar maka kontribusinya adalah pendapatan – PAD x 100% hasilnya adalah kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah.

9. Bagaimanakah cara penentuan dan penetapan target pajak restoran

kabupaten gowa

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Pajak restoran adalah salah satu pajak yang dikelola oleh kabupaten gowa yang secara teknis berada di bawah tanggung jawab dinas pariwisata. Untuk menetapkan targetnya berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan berdasarkan potensi pajak yang ada tahun ini. Pajak tahun lalu di tambah dengan pajak tahun ini lalu di bagi dua , itulah rata-rata target pajak reklamenya.

10. Adakah kesulitan atau kendala selain dana yang dihadapi dalam pemungutan pajak/realisasi target pajak? Dapatkah dijelaskan?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Kesulitan yang duhadapi selain dana adalah dukungan sarana dan prasarana penagihan karna kurangnya tenaga penagihan, kurangnya sarana mobilitas penagihan, selain dari itu masyarakat yang masih banyak belum memahami kewajiban untuk membayar pajak sehingga pada saat melakukan penagihan dari beberapa masyarakat mengatakan dengan berbagai alasan untuk membayar pajaknya.

11. Apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah pemerintah menetapkan seluruh peraturan daerah yang mengatur pajak, intensifikasi pajak serta pengoptimalan dalam penagihan ekstensifikasi, melakukan pendataan beberapa objek pajak yang saat ini belum terdata sebagai wajib pajak.

12. Adakah penyuluhan kepada wajib pajak di kabupaten gowa?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Ada, bahwa pemerintah kabupaten gowa setiap tahun melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat mulai dari kecamatan desa kelurahan sampai dengan dusun tentang peraturan yang mengatur pajak dan retribusi setiap tahun.

13. Adakah upaya memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak di kabupaten gowa?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Ada, dengan saat ini pemerintah kabupaten gowa melakukan upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayarannya dengan cara pemerintah melakukan kemitraan dengan seluruh perbankan yang ada di gowa dan dengan pelayanan yang berbasis online sehingga dimanapun wajib pajak bisa melakukan pembayaran pajak.

14. Adakah kesulitan yang dihadapi dalam pembukuan dan pencatatan penerimaan pajak?

Dijawab oleh: Irnawati Nur

Ada. Kesulitan yang dialami pemerintah dengan adanya pencatatan yang berbeda antara pihak perbankan dengan pihak pendapatan daerah sehingga dilakukan setiap bulannya pemerintah melakukan pencocokan atau rekonsiliasi.

15. Adakah penegakan sanksi pajak? Ada kesulitan yang dihadapi dalam penegakan sanksi pajak?

Dijawab oleh: DRS. HASANUDDIN, BM.,MM

Ada. Peraturan daerah telah mengatur dengan peraturan sanksi atas

pelanggaran ketentuan yang telah di atur dalam peraturan daerah dengan cara melakukan penerbitan surat keputusan pajak daerah yang kurang bayar bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan sanksi yang dilakukan adalah penutupan usaha oleh pihak keamanan (satpol PP).sebagai landasan peraturan sanksi yang dilakukan pemerintah kabupaten gowa adalah sanksi administrasi dan sanksi lainnya apabila terlambat melakukan pembayaran maka dikenakan sanksi setiap bulan.







Penulis skripsi yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Kabupaten Gowa ” adalah Mujahidin Lahir di Manjalling pada tanggal 20 Desember 1995 penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Bakri dan Ibu Hasiah. Peneliti sekarang bertempat tinggal Mattoanging Desa Mandalle

Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Mattoanging lulus pada tahun 2006, MTS Muhammadiyah Mandalle lulus pada tahun 2010, SMK Negeri 1 Limbung Lulus pada tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar .